

Dwi Yuni Awalyati

Peran The Nature Conservancy (TNC) Dalam Pelaksanaan Program Karbon Hutan Berau (PKHB) Di Kabupaten Berau

Dwi Yuni Awalyati*

Universitas Mulawarman Samarinda

E-mail: *dwisamarinda98@gmail.com

ABSTRACT

The research showed that in the Berau Forest Carbon Program (BFCP) implementation was not separated from the vision and mission of The Nature Conservancy (TNC) which consistently protect the forest and increase the livelihood of the forest community through sustainable management of natural resource. This is also not separated from the roles of TNC to slow down the climate change by providing a model for sustainable, low-emission development in collaboration with the Government of Berau District. TNC also plays a role as a facilitator that supports the process of discussion, deep concepts about the conditions, problems and mapping, facilitates the interaction and negotiation, and helps obtain and confirm legal supports from the Ministry of Forestry for a pilot program at district level and supports the improvement of the government and private institution capacity in the relationship between community and low-carbon environment.

Keywords: *The Nature Conservancy (TNC), Berau Forest Carbon Program (BFCP), Berau District.*

Pendahuluan

Aktivitas manusia menimbulkan berbagai macam perubahan terhadap alam, antara lain meningkatnya kadar karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca (GRK) lainnya seperti polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, bahan bakar minyak, dan gas alam. Dari pembakaran itu berakibat terjadinya emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global (Bayong Tjasyono, 1987:45).

Dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global menyebabkan berbagai negara di dunia mencari cara untuk mengatasinya. Protokol Kyoto telah dirundingkan pada tahun 1997 bertujuan agar seluruh negara industri mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pencemaran udara. Protokol

Kyoto telah memperoleh kekuatan hukum internasional sejak 16 februari 2005. Protokol Kyoto berisikan kesepakatan legal pemerintah negara-negara Annex I (pada umumnya negara industri) mengenai target pengurangan emisi gas rumah kaca untuk diterapkan pada periode 2008 hingga 2012.

Laporan IPCC (*Indonesian Climate Change Programme*) mengenai kenaikan temperatur bumi yang meningkat mengakibatkan indikasi bahwa protokol Kyoto telah gagal menurunkan emisi gas rumah kaca (www.iklimkarbon.com). Pada tanggal 3-14 Desember 2007 di Nusa Dua, Bali diadakan Konferensi ke-13 (*13th Conference of Parties/COP13*) Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*). Salah satu

Dwi Yuni Awalyati

pembahasan adalah mengenai kesepakatan pelaksanaan program REDD yang bertujuan untuk mengatasi masalah *global warming* (Andreas Pramudianto, 2008:50).

Program *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* atau REDD merupakan metode penghitungan kompensasi pengurangan emisi yang dapat diimplementasikan pada konservasi hutan. Setelah pertemuan para pihak ke-15 UNFCCC di Copenhagen. Presiden Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan 26 % emisi nasional dengan anggaran mandiri dan dapat meningkat hingga 41 %, jika kemudian terdapat bantuan-bantuan dari pihak luar. Keberadaan REDD sangat dibutuhkan oleh negara berkembang, khususnya menyangkut pemberian dana kompensasi atas kesediaan negara pemilik hutan tropis untuk tidak mengeksploitasi hutan (Supriadi, 2011:388).

Pemerintah Kabupaten Berau bertekad mengubah arah pembangunan melalui transformasi dalam pendekatan tata kelola sumber daya alam, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan sumber daya manusia dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Kabupaten Berau mempunyai luas wilayah 34.127,47 km² dan memiliki luas hutan 2.194.299,525 Ha (Rencana tata ruang wilayah 2005-2011) terdiri dari Hutan Lindung 668.108,078 Ha, Hutan Produksi Terbatas 557.713,442 Ha, Hutan Produksi Tetap 179.299,747 Ha, Hutan Konservasi 156.448,289 dan Areal Penggunaan Lain (APL) 624.729,969 Ha. Berdasarkan data Dinas Kehutanan, tahun 2010 luas alih fungsi hutan seluas 150.448 Ha atau 6,85 %, masing-masing untuk keperluan pembangunan perkebunan 60.224 Ha, pertambangan 7.571 Ha, pertanian 70.000 Ha, permukiman dan fasilitas pelayanan

umum lainnya 12.693 Ha (www.beraukab.go.id).

Bersama dengan *The Nature Conservancy* (TNC), Kabupaten Berau telah mengembangkan Kelompok Kerja Program *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (POKJA REDD) yang bertugas untuk menyediakan bantuan teknis bagi Bupati maupun para pengambil keputusan dibawahnya yang terkait dengan pelaksanaan Program *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD) di tingkat Kabupaten.

Program-program TNC mendukung program kerja *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (POKJA REDD) yang bertujuan untuk melindungi alam dan melestarikan kehidupan, TNC tersebar di 50 negara bagian Amerika dan 33 negara lain dan bekerja sama dengan individu dan pemerintah hingga lembaga non profit dan korporasi lokal (www.nature.or.id). Sehingga dapat berjalannya kerjasama antara TNC, POKJA REDD dan Pemerintah Kabupaten Berau semakin baik.

The Nature Conservancy (TNC) bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Berau untuk menindaklanjuti komitmen Pemerintah RI dengan mengembangkan kegiatan REDD dalam suatu Program Karbon Hutan Berau (PKHB) adalah suatu program kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan, berbagai lembaga pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga donor untuk bersama-sama mengembangkan program percontohan pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan stok karbon melalui kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan mekanisme

Dwi Yuni Awalyati

pendanaan karbon yang secara efektif memberikan insentif atas pengurangan emisi yang diakibatkan oleh hilangnya tutupan hutan.

Kabupaten Berau memiliki salah satu kelebihan dalam pelaksanaan REDD dikarenakan Kabupaten Berau mendapatkan pendanaan terlebih dahulu dalam program kegiatan PKHB, mekanisme pendanaan PKHB selanjutnya akan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan yang ada, baik di tingkat program, nasional, dan internasional, termasuk pengembangan dana perwalian (*Trust Fund*).

Salah satu aspek dalam pengembangan PKHB adalah pengukuran emisi karbon pada beberapa tipe penggunaan lahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Berau. Tujuannya untuk mengetahui sejarah perubahan lahan yang akan berpengaruh pada perubahan emisi karbon serta untuk memperkirakan pengurangan karbon per unit area lahan, karbon per unit untuk produksi kayu, dan karbon per unit area untuk keterbukaan kawasan yang diakibatkan dari kegiatan penebangan di kawasan hutan alami yang terdapat di Kabupaten Berau. Berdasarkan uraian di atas, penulis membatasi masalah pada peran *the nature conservancy* dalam pelaksanaan PKHB di Kabupaten Berau dan bertujuan untuk mengetahui peran TNC dalam pelaksanaan Program Karbon Hutan Berau (PKHB) di Kabupaten Berau.

Teori Politik Hijau

Studi hubungan internasional yang diketahui umumnya berfokus pada kajian mengenai negara, aktor-aktor, kepentingan nasional dan *power*. Isu mengenai non-negara seperti lingkungan hidup jarang tersentuh dan dibahas dalam studi hubungan internasional. Karena pada dasarnya sebuah negara hanya memikirkan

bagaimana meningkatkan sebuah *power* demi memenuhi kepentingan nasionalnya. Padahal dewasa ini, lingkungan hidup merupakan elemen penting yang ada di dalam sebuah negara. Percuma saja negara memiliki kekuatan yang dominan dalam politik internasional akan tetapi kelestarian lingkungan hidup di dalam negaranya diabaikan. Padahal kerusakan lingkungan seperti *global warming*, polusi udara, hujan asam dan lain-lain saat ini, harusnya menjadi pecutan untuk sebuah negara agar lebih memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Ancaman-ancaman kerusakan lingkungan tersebut kemudian diperhatikan oleh para penstudi ini dengan memasukkan sebuah teori *Green Perspective* dalam kajian hubungan internasional sebagai wujud kepedulian negara dalam melestarikan lingkungan hidup internasional.

Menurut Burchill & Linklater, terdapat dua karakteristik Politik Hijau, yakni pertama ialah adanya penolakan atas antroposentrisme karena lebih condong ke ekosentrisme (Burchill Scott dan Andrew Linklater, 1996). Hal itu disebabkan karena antroposentris hanya menempatkan nilai moral atas manusia dimana terdapat nilai independen atas ekosistem dan semua makhluk hidup. Kedua ialah pembatasan pertumbuhan terhadap krisis lingkungan karena pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksponen yang menyebabkan krisis lingkungan saat ini. Oleh karena itu, fokus utama dari Politik Hijau ini ialah lebih kepada alam bukan manusia, bagaimana pemanfaatan alam yang baik dan menanggulangi ancaman kerusakan ekosistem terlepas dari peranan manusia dalam mengelola perbaikan-perbaikan tersebut.

Konsep Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih, yang berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, struktur organisasi (Sefriani, 2011:142).

Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya : *"Administrasi dan Organisasi Internasional"* menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.
2. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Dan ada kalanya bertindak sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping, operation* dll).

Organisasi internasional terbagi menjadi dua varian, yaitu pertama, *International Government Organization* (IGO) organisasi ini adalah organisasi yang biasanya dilakukan oleh antar negara atau pemerintah sehingga terjalin suatu hubungan baik yang bersifat kerjasama maupun untuk penyelesaian konflik sedangkan yang kedua yaitu, *International Non-Government Organization* (INGO) adalah organisasi non-pemerintah atau yang dilibatkan dalam pembentukan, keanggotaan dan dalam kegiatan organisasi adalah bukan pemerintah masing-masing negara, organisasi ini bersifat independen dalam menyikapi permasalahan yang ada di dunia internasional tetapi pada umumnya INGO bergerak dibidang-bidang yang khusus saja. Tidak dapat dipungkiri

sepenuhnya bahwa INGO telah berusaha berbuat banyak dan cukup bermanfaat dalam menanggulangi masalah umat manusia serta lingkungan hidup (Teuku May Rudy, 1998:16-18).

Organisasi Internasional dilihat sebagai suatu pengaturan formal yang melintasi asas-asas nasional dan menciptakan suatu kondisi bagi pembentukan perangkat instusional guna mendukung kerjasama di antara anggota-anggota dalam bidang keamanan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Organisasi dan pengaturan internasional merupakan satu kesatuan yang terpisahkan, oleh sebab itu maka analisis peranan organisasi membuat jarak di antara keduanya.

Kemampuan mengidentifikasi arah atau kerangka aktivitas-aktivitas organisasi internasional memungkinkan analisis-analisis yang lebih spesifik dan mendalam (termasuk studi kasus). Ini akan bertempat pada akumulasi peranan organisasi internasional. Eksplorasi dan analisis aktivitas-aktivitas organisasi internasional, baik pada kelompok pertama, kedua, dan ketiga, akan menampilkan sejumlah peranan organisasi, seperti *inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator, determinator*, dan lainnya termasuk yang negatif seperti *destroyer*. Namun bila menggunakan klasifikasi yang luas, aktivitas-aktivitas tersebut dapat dikelompokkan ke dalam peranan sebagai instrumen, peranan sebagai forum, atau peranan sebagai aktor *independent*.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu berupaya untuk menggambarkan Peran *The Nature Conservancy* dalam pelaksanaan PKHB di Kabupaten Berau. Teknik pengumpulan data berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*) dan

Dwi Yuni Awalyati

teknik analisa data kualitatif, dengan menjelaskan dan menganalisis data dari berbagai sumber serta semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Pembahasan

Berdasarkan areal luas lahan, Kabupaten Berau adalah kabupaten terbesar ketiga di Kalimantan Timur dengan luas 34.127 km². Berau menjadi salah satu program percontohan REDD berskala Kabupaten yang dikembangkan melalui Program Karbon Hutan Berau (PKHB) yaitu program kemitraan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional, serta NGO seperti *The Nature Conservancy* (TNC), dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan strategi pembangunan rendah karbon di tingkat kabupaten secara terpadu dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan sumber mata pencaharian masyarakat, serta dapat melindungi hutan sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.

PKHB akan membantu penguatan kondisi area hutan melalui perencanaan, tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan dan pendanaan di muka dimana sebagian dana untuk penerapan tahap percontohan selama lima tahun. PKHB juga akan melibatkan masyarakat dalam merancang dan menerapkan program serta dengan dukungan TNC akan membantu perusahaan untuk mengelola kayu rendah karbon.

PKHB tidak lepas dari visi misi program TNC di Kabupaten Berau antara lain:

- a. Melindungi keanekaragaman hayati di seluruh kawasan hutan di dunia terhadap dampak perubahan iklim. Dalam hal ini, TNC membantu

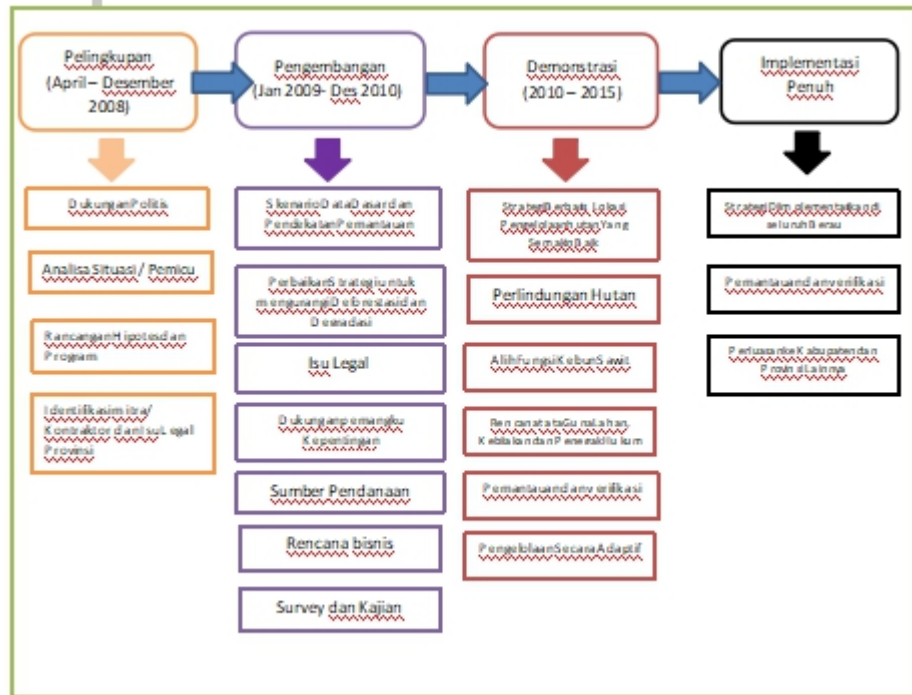
memperluas wilayah ekosistem yang hampir terancam punah dikarenakan tidak semua ekosistem yang dilindungi oleh undang-undang. TNC juga membantu mengelola secara efektif beberapa perusahaan hutan tropis dengan total area sekitar 540.000 hektar di wilayah Kalimantan timur.

Untuk melindungi keanekaragaman hayati yang efektif memerlukan struktur pemerintahan yang menghasilkan keputusan yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk semua tingkat pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat setempat. Demikian memungkinkan Berau siap untuk berpartisipasi dalam perubahan iklim dan ketika pasar karbon muncul di masa mendatang.

- b. Secara konsisten melindungi hutan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat hutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mendukung masyarakat dalam tata guna lahan rendah emisi. Sejak tahun 2007, TNC bersama pemerintah, masyarakat lokal dan pihak swasta di Kalimantan Timur melindungi hutan dari penebangan liar, dengan cara menerapkan manajemen konservasi diluar area yang dilindungi oleh pemerintah. Salah satunya dengan mempromosikan penebangan kayu legal dan berkelanjutan kepada pemegang HPH. Bersamaan dengan itu, TNC membantu memfasilitasi beberapa perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan dari Badan Akreditasi Internasional.

- c. Hasil Tahapan TNC di Kabupaten Berau antara lain dapat dilihat di Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 1
Tahapan Program TNC Kabupaten Berau



Sumber : www.nature.or.id

Pada tabel diatas terlihat beberapa tahapan program pelaksanaan PKHB sampai tahap penerapan penuh. Masing-masing tahapan tersebut tidak lepas dari adanya peran TNC antara lain

- a. Pelingkupan (April – Desember 2008)
 Pada tahap ini, Pemerintah Kabupaten Berau didukung oleh TNC untuk mendapatkan dan mengukuhkan dukungan politik dan kebijakan, baik dari tingkat nasional maupun tingkat daerah, khususnya dari Kementerian Kehutanan untuk program percontohan REDD+ berskala kabupaten. Untuk memenuhi program percontohan REDD diperlukan program analisa dan pemetaan yang tepat untuk Program Karbon Hutan Berau yang merupakan sebuah program peningkatan kapasitas selama 5 tahun. Tujuan dari program tersebut untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas

informasi untuk Berau, meningkatkan tingkat keterampilan manajemen dan teknis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menggunakan informasi, merumuskan serta memperkuat pengaturan hukum dan institusional untuk menghasilkan, menyebarkan dan menggunakan informasi, mengurangi konflik terkait dengan otoritas dan akses menuju sumber daya hutan serta pemanfaatannya, dan membuat perencanaan tujuan, prosedur dan hasil yang lebih jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selama proses tersebut, pada April 2008 terbentuklah Kelompok Kerja REDD Berau.

- b. Pengembangan (Januari 2009 – Desember 2010)
 Pada tahap pengembangan ini, Kelompok Kerja REDD Berau didukung secara khusus oleh TNC, untuk melakukan

analisa dan konsep mendalam atas kondisi dan permasalahan program, khususnya pada sektor kehutanan dan perubahan lahan di Berau. Analisa dan konsep tersebut mencakup kajian atas profil dan estimasi emisi yang bersumber dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan di Berau, kondisi deforestasi dan degradasi hutan di Berau, penyebab utama terjadinya perubahan penggunaan dan tutupan lahan di Berau serta kondisi kesiapan implementasi tahap percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau. Untuk memastikan koordinasi tahap pengembangan program ini pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, serta menjamin partisipasi dan kolaborasi multi pihak dapat berjalan dengan baik, Kelompok Kerja REDD Berau mendorong pembentukan *Joint Working Group* yang merupakan forum dari para pihak kunci, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, dalam pengembangan program percontohan REDD+ berskala kabupaten di Berau.

b. Demonstrasi (2011-2015)

Pada tahap percontohan, program akan menginvestasikan sumber daya sebagai upaya pengurangan emisi pada tapak-tapak yang dipilih menjadi fokus sasaran program dan mendorong terbentuknya sistem MRV (*Measurable, Reportable and Verifiable* - sistem yang terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi), pada saat yang sama, program akan mengidentifikasi serta mengembangkan alat bantu pengambilan keputusan yang tepat bagi pertukaran/penggunaan lahan dengan mempertimbangkan perkembangan atas pendekatan kebijakan dan insentif positif pada tingkat global.

Pada tahap percontohan PKHB yang berskala kabupaten mempunyai strategi Penguatan Kondisi Pemungkin. Strategi

ini akan mencakup salah satu upaya pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian manfaat yang adil, yang akan mencoba mengembangkan skema pendanaan di muka, di mana sebagian besar dana untuk penerapan tahap percontohan selama lima tahun akan diperoleh dari lembaga-lembaga donor seperti *The Nature Conservancy* dan mendorong perolehan akses pembiayaan melalui mekanisme pasar karbon sukarela atau pembayaran berbasis kinerja untuk mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan, dan akan menginvestasikan dan mendistribusikan dana serta manfaat yang diterima kepada para pemangku kepentingan secara adil.

c. Implementasi Penuh (2016)

Pada tahap ini TNC akan mendukung peningkatan kapasitas instansi pemerintah dan swasta dalam hubungan kepada masyarakat, mendukung pembentukan jejaring antar kampung, meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa lingkungan dan mengembangkan mata pencaharian rendah karbon serta TNC membantu pemantauan dan verifikasi terhadap pengimplementasian secara penuh keseluruhan program di seluruh Kabupaten Berau dan kabupaten lainnya, serta melakukan sosialisasi keberhasilan terhadap tercapainya Tujuan dari TNC dalam pelaksanaan PKHB.

Strategi TNC yang berhasil dilakukan pada tahun 2012 di Kabupaten Berau antara lain :

a. Penyelesaian konservasi Desa di Kelay dan Segah

Sejak tahun 2007 sampai tahun 2012, TNC telah fokus dalam penyelesaian konservasi hutan di 16 desa di Kelay dan Segah. 16 desa yang telah di konservasi menjadi hutan lindung dan di budidayakan menjadi hutan konservasi

Dwi Yuni Awalyati

perkebunan, sekitar 20.000 ha area perkebunan kelapa sawit dikelola secara berkelanjutan, masih ada 4 desa di wilayah Segah yang belum mendapatkan konservasi hutan dan perkebunan. Desa-desanya tersebut antara lain Desa di Hulu Segah, Desa Hulu Kelay, Desa Lesan dan Desa Muara Lesan.

b. Meningkatkan kesadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal terkait dengan perubahan iklim. Peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal terkait dengan perubahan iklim di Kabupaten Berau yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Berau dan TNC yaitu dengan meningkatnya kesadaran akan hasil hutan yang telah di konservasi di wilayah desa Kelay dan Lesan, sehingga meningkatkan hasil pendapatan masyarakat desa akan perekonomiannya serta perluasan wilayah hutan di 16 desa Kelay dan Lesan dari tahun 2007 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan dari kesadaran masyarakat lokal yang dari luas wilayah hutan konservasi perkebunan 16.000 ha menjadi 197.000 ha. Hal ini dikarenakan warga sekitar mendapatkan hasil dari adanya konservasi hutan ke perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Berau dan TNC.

Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mencari sumber penghasilan tanpa harus merusak hutan yang telah di konservasi mengalami peningkatan yang sangat baik. Hal ini karena adanya penurunan 7 juta ton CO₂e selama 5 tahun. Serta melindungi area HCVA termasuk habitat orangutan di area konservasi hutan yang telah menjadi wilayah perkebunan di 20 desa Kelay dan Lesan.

Dukungan masyarakat akan perbaikan kesejahteraan di wilayah perbatasan hutan konservasi dan wilayah yang telah menjadi area perkebunan serta pertambangan, sehingga mampu menjadi sumber penghasilan yang baik untuk warga lokal. Bersama dengan masyarakat lokal merumuskan praktek-praktek pemanfaatan lahan yang rendah emisi. TNC dan Pemerintah mengembangkan berbagai model pemberdayaan masyarakat lokal akan hasil olahan dari hasil perkebunan dan hutan.

c. Peran Kemitraan TNC yang belum terselesaikan di tahun 2012 pada program PKHB antara lain :

1. Keuangan/dana berkesinambungan, TNC berkomitmen akan memberikan bantuan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada tahun 2007 sebesar \$ 10 m untuk membangun wilayah konservasi hutan di Kabupaten Berau. Hal ini belum selesainya pembangunan konservasi hutan sehingga masih tersedianya dana untuk program pengembangan hutan konservasi.
2. Membuat program-program implementasi dari pelaksanaan tujuan-tujuan strategis sebesar \$ 5 m.
3. Membuat kebijakan-kebijakan bersama pemerintah Kabupaten Berau dalam kerjasama-kerjasama dalam bantuan-bantuan untuk masyarakat, bantuan untuk melakukan penelitian.
4. Melakukan rancangan untuk program-program masa yang akan datang (seperti program pertambangan) penelitian dan pengembangan wilayah untuk masyarakat provinsi dan Negara

TNC telah menunjukkan konsistensinya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keberlanjutan program konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, kawasan hutan dan

Dwi Yuni Awalyati

konservasi kawasan yang berkesinambungan. Dalam PKHB, TNC telah berhasil memfasilitasi Kabupaten Berau sebagai salah satu wilayah percontohan program pengurangan emisi karbon (*Reduced Emissions from Deforestation and Degradation – REDD*) berskala kabupaten di Indonesia, serta TNC berhasil dalam memfasilitasi pengembangan pengelolaan hutan lestari dengan sistem ramah lingkungan. Program ini bekerjasama dengan berbagai perusahaan pengelola hutan alam (IUPHHK-HA) yang bekerja di wilayah Berau dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pihak ketiga yang bermitra dengan perusahaan dalam pengelolaan hutan lestari bersama masyarakat (*Colaborative Management*). Adapun beberapa perusahaan yang telah difasilitasi diantaranya PT. Sumalindo Lestari Jaya IV, PT. Inhutani I, PT. Amindo, PT. Mahardhika PT Rizki Kacida Reana dan sebagainya.

TNC juga telah mendukung penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat lokal di Kecamatan Kelay dan Segah, yaitu dengan memfasilitasi pembentukan dan pendampingan kelembagaan dan pengembangan program berbagai kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan masyarakat pemantau pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan yang berkelanjutan di Hulu Segah dan Kelay yaitu Badan Pengelola Segah (BP Segah) dan Forum Kampung Hulu Kelay (FK Hulu Kelay), serta Badan Pengelola Kawasan Hutan Lindung Sungai Lesan (BP Lesan).

TNC dalam melakukan pelestarian hutan yang secara langsung dapat menurunkan emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim di Kabupaten Berau, mempunyai hambatan dalam pelaksanaannya yaitu

1. Lemahnya kapasitas masyarakat lokal untuk terlibat dalam isu-isu pengelolaan sumberdaya alam lestari yang berkembang. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan akses terhadap isu-isu pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan serta proses perumusan kebijakan, pelaksanaan maupun pemantauan baik pada tingkat daerah maupun pusat, lemahnya kapasitas teknis pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik, lemahnya pengorganisasian masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan, dan ketidakjelasan batas-batas wilayah kelola masyarakat.

2. Masalah yang berada dalam wilayah penyelesaian di tingkat pemerintah baik daerah maupun pusat, diantaranya adalah (a) ketidakpastian usaha jangka panjang yang disebabkan karena ketidakjelasan *land-use*, tatabatas HPH maupun wilayah administrative masyarakat hingga tingkat desa yang belum terselesaikan, persyaratan dan prosedur perpanjangan ijin HPH, (b) biaya tinggi yang timbul pada kegiatan transportasi kayu, pajak dan biaya kompensasi, (c) lemahnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam penegakan aturan, terlalu banyak aturan yang terkadang tumpah tindih dan cepat berubah, kurangnya penegakan sanksi, pemberian insentif dan koordinasi pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

Kesimpulan

The Nature Conservancy (TNC) merupakan organisasi yang melindungi daratan dan lautan yang penting bagi kehidupan manusia dan alam. TNC memulai kegiatannya di Indonesia pada tahun 1991 dan pada tahun 2001 memulai upaya-upaya konservasinya di Kabupaten Berau, dengan area kerja di Hulu Kelay, Hulu Segah dan Kepulauan Derawan melalui kerjasama dengan

Dwi Yuni Awalyati

pemerintah lokal serta program konservasi tersebut juga memperhatikan isu-isu konservasi di seluruh Provinsi Kalimantan Timur.

Program Kehutanan TNC di Kabupaten Berau saat ini fokus untuk mendukung program prioritas yang salah satunya Program Karbon Hutan Berau (PKHB) adalah program kemitraan dari kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, lembaga non pemerintah, *The Nature Conservancy* (TNC), dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan secara terpadu strategi pembangunan rendah karbon yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan mata pencaharian untuk masyarakat Berau, sekaligus memberikan perlindungan hutan. Pelaksanaan Program Karbon Hutan Berau akan dilakukan dalam empat tahap, yaitu tahap perlingkupan,

Rederensi

- Burchill Scott dan Andrew Linklater. 1996. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Bandung:Nusa Media
- May, T Rudy. 2003. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung:PT Eresco
- Pramudianto,Andreas,2008,*Diplomasi Lingkungan Teori dan Fakta*.Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia
- Sefriani. 2011. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta:PT Raja Grafindo
- Supriadi.2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta:PT Sinar Grafika.
- Tjasyono,Bayong. 1987. *Iklim dan Lingkungan*. Bandung:PT Cendekia Jaya Utama

Internet :

- Protocol Kyoto <http://iklimkarbon.com/perubahan-iklim/protokol-kyoto/> diunduh tanggal 18 maret 2013
- Kehutanan <http://www.beraukab.go.id/potensi/view/1/kehutanan> diunduh tanggal 19 April 2013
- The Nature conservansy* (TNC) www.nature.or.id/faq diunduh tanggal 23 januari 2013
- Tujuanwww.karbonhutanberau di unduh tanggal 13 juni 2013

pengembangan, demonstrasi dan implementasi penuh.

TNC juga membantu beberapa perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan dari badan akreditasi internasional (*Forest Stewardship Council*) maupun Lembaga Ekolabel Indonesia-LEI serta program sertifikasi yang telah dicanangkan Pemerintah, baik melalui Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (PHPL-SVLK), dengan praktek penebangan kayu ramah lingkungan rendah emisi karbon atau *Reduced Impact Logging-C* (RIL-C) berpotensi dapat menurunkan tingkat emisi karbon, sehingga mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi hingga 26% pada tahun 2020.